

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan iklim merupakan isu global yang menuntut tindakan kerja sama lintas negara. Salah satunya diwujudkan melalui bantuan luar negeri Australia kepada Indonesia. Australia memandang isu perubahan iklim sebagai prioritas strategi dalam hubungan bilateralnya dengan Indonesia. Bantuan ini tidak lepas dari kerentanan Indonesia yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim, sekaligus posisi strategis Indonesia dalam upaya mitigasi global. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi ancaman nyata seperti kenaikan permukaan laut, perubahan pola curah hujan, serta meningkatnya frekuensi bencana. Sejak tahun 2007 Australia telah memberikan bantuan terhadap Indonesia terkait dengan perubahan iklim (Davies, 2015). Hingga saat ini bantuan masih diberikan dalam berbagai bentuk kemitraan setara dengan Indonesia, sehingga fokus penelitian dan inovasi diarahkan untuk mendukung kebijakan mitigasi emisi dan adaptasi iklim di Indonesia. Fokus Australia pada sektor ini konsisten dengan agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs), terdapat 4 poin SDGs yaitu SDGs 13, SDGs 7, SDGs 9, SDGs 17. (Hardi, Kusuma, & Basuki, 2019).

Secara praktis, motif Australia memberikan bantuan kepada Indonesia dapat dilihat dari beberapa dimensi yang saling terkait. Pertama, dimensi strategis

sebagai negara tetangga dan mitra dagang penting, Australia berkepentingan menjaga kondisi regional yang stabil dan dapat diprediksi. Investasi dalam kapasitas energi terbarukan Indonesia membantu mengurangi risiko sosial-ekonomi yang dapat memicu ketidakstabilan misalnya, pengangguran, migrasi internal, dan persaingan sumber daya yang semuanya berpotensi berdampak lintas batas. Pada dimensi ekonomi, transisi energi membuka peluang nilai tambah ekonomi, pengembangan rantai pasok teknologi terbarukan, serta peluang komersial bagi perusahaan Australia dan mitra internasional. Kerjasama ini juga memperkuat konektivitas ekonomi melalui investasi bersama, transfer teknologi, dan pembentukan pasar energi yang lebih hijau. Pada dimensi lingkungan dan komitmen internasional, dukungan Australia membantu Indonesia memenuhi target penurunan emisi dan tujuan pembangunan berkelanjutan, sementara Australia sendiri dapat memperkuat kredibilitas internasionalnya dalam aksi iklim melalui kemitraan yang jelas berdampak. Pada dimensi diplomatik dan *soft power*, program-program bantuan yang dirancang sebagai kemitraan riset dan pengetahuan membangun jaringan kelembagaan, mengkonsolidasikan hubungan antar universitas, lembaga riset, dan pembuat kebijakan, sehingga meningkatkan pengaruh non-koersif Australia dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia. Pernyataan dan dokumen resmi kemitraan pembangunan Australia dengan Indonesia menegaskan bahwa tujuan kerjasama ini adalah memajukan kemakmuran, stabilitas, dan ketahanan Indonesia. Hal tersebut merupakan tujuan yang selaras pula dengan kepentingan nasional Australia (Husain, 2023).

Dalam praktik operasional, bantuan Australia kepada Indonesia di sektor perubahan iklim diwujudkan melalui program-program yang berfokus pada krisis iklim. Terdapat banyak program yang relevan terkait sektor perubahan iklim, *Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership* (IAFCP) yang dimana program ini memiliki tujuan untuk memotong emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan melalui di Kalimantan (Rosenberg & Wilkinson, 2013). *Australia-Indonesia Climate and Infrastructure Partnership* (CIP) yang bertujuan mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan rendah emisi di Indonesia. Program ini kemudian berkembang menjadi berbagai inisiatif lanjutan seperti *Australia-Indonesia Partnership for Climate, Renewable Energy and Infrastructure* (KINETIK) yang berfokus pada percepatan transisi energi bersih melalui pengembangan kebijakan, investasi, dan teknologi energi terbarukan. Selain itu, Australia juga mendorong pendekatan berbasis pengetahuan melalui program *Knowledge Partnership Platform* (KONEKSI) yang mempertemukan akademisi, peneliti, dan pembuat kebijakan dari kedua negara untuk menghasilkan solusi inovatif berbasis riset terhadap isu perubahan iklim. Program lain seperti *Partnership for Australia-Indonesia Research* (PAIR) turut memperkuat kolaborasi riset terapan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk dalam konteks adaptasi perubahan iklim di tingkat lokal. (Pusat Australia-Indonesia, 2026).

Dalam konteks kebijakan bilateral yang lebih luas, pembangunan kemitraan energi juga dipertegas melalui instrumen diplomatik tingkat tinggi, termasuk penandatanganan Nota Kesepahaman (*MoU*) tentang transisi energi antara otoritas energi kedua negara pada 2 Juli 2024. *MoU* tersebut menegaskan bahwa kedua pemerintah bermaksud memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan, mempromosikan investasi infrastruktur energi, dan berbagai praktik terbaik dalam mencapai target *net-zero*. Penandatanganan *MoU* dan inisiatif bersama yang mengikutinya, misalnya panggilan bersama untuk proposal riset di bidang transisi energi menunjukkan bagaimana program-program bantuan tersambung dengan agenda diplomatik yang lebih luas, sehingga bantuan berbasis pengetahuan berfungsi juga sebagai sarana operasionalisasi komitmen politik bilateral (Department of Foreign Affairs and Trade, 2024).

Penggunaan kerangka *Foreign Aid* dalam penelitian ini menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana bantuan luar negeri dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam perspektif hubungan internasional, bantuan luar negeri tidak hanya dipahami sebagai bentuk transfer dana atau dukungan pembangunan, tetapi juga sebagai fenomena politik, ekonomi, dan institusional yang kompleks yang dapat digunakan oleh negara donor untuk mencapai berbagai kepentingan strategisnya (Martinussen & Pedersen, 2003).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan gap penelitian, yang pertama Penelitian mengenai kerjasama internasional dan energi terbarukan di Indonesia telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Penelitian yang berjudul “Kerjasama Indonesia Dengan Uni Eropa Di Bidang Lingkungan Dan Perubahan Iklim (2020-2022)” oleh Azwinanto dan Zaman (2023) menyoroti kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa dalam bidang lingkungan dan perubahan iklim pada periode 2020–2022. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kerjasama internasional dalam isu lingkungan semakin meningkat sejak adanya komitmen global seperti Perjanjian Paris, khususnya dalam upaya penurunan emisi karbon dan pengembangan energi terbarukan. Kerjasama tersebut mencakup dukungan kebijakan, transfer pengetahuan, serta berbagai program kolaboratif yang bertujuan memperkuat kapasitas Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Namun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada bentuk kerjasama bilateral secara umum serta komitmen kebijakan yang disepakati oleh kedua pihak, sehingga belum secara mendalam membahas implementasi program kolaborasi PAIR dan KONEKSI dalam sektor energi terbarukan (Azwinanto, 2023).

Sementara itu, penelitian dengan judul “Mempromosikan Energi Terbarukan: Diplomasi Lingkungan Indonesia dalam Menanggulangi Perubahan Iklim [Promoting Renewable Energy: Indonesia’s Environmental Diplomacy in Tackling Climate Change]” oleh Nasution dkk. (2024) membahas diplomasi lingkungan Indonesia dalam mempromosikan energi terbarukan sebagai bagian dari strategi menghadapi perubahan iklim global. Penelitian ini

menekankan pentingnya diplomasi lingkungan sebagai instrumen bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional dalam bidang energi bersih, termasuk melalui transfer teknologi, peningkatan kapasitas institusional, serta dukungan dari organisasi internasional dan negara mitra. Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa diplomasi energi dan lingkungan memainkan peran penting dalam memperluas akses Indonesia terhadap sumber daya, teknologi, dan pendanaan yang diperlukan untuk mempercepat transisi energi. Namun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada strategi diplomasi lingkungan secara umum dan belum secara khusus mengkaji implementasi program kerjasama tertentu yang dijalankan dalam kerangka bantuan pembangunan (Nasution, 2024).

Di sisi lain, penelitian dengan judul “Pola Bantuan Internasional dalam Membangun Sektor Energi Terbarukan di Indonesia: Analisis Teori Perdagangan dan Blok Ekonomi” oleh Salsabila (2025) menjelaskan pola bantuan internasional dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia yang mencakup berbagai bentuk dukungan seperti pendanaan, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mempercepat proses transisi energi nasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan internasional memainkan peran penting dalam membantu negara berkembang seperti Indonesia mengatasi keterbatasan sumber daya dan teknologi dalam mengembangkan sektor energi terbarukan. Meskipun demikian, penelitian tersebut masih melihat bantuan internasional secara umum tanpa menyoroti secara spesifik bagaimana implementasi bantuan

pembangunan dari negara donor tertentu dijalankan melalui program kerjasama yang konkret dan terstruktur (Salsabila, 2025).

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian sebelumnya lebih banyak membahas kerjasama internasional, diplomasi lingkungan, serta pola bantuan energi terbarukan secara umum. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi bantuan luar negeri dari negara donor tertentu dalam bentuk program kolaborasi yang spesifik. Dalam konteks hubungan Australia dan Indonesia, kajian yang meneliti secara mendalam implementasi bantuan luar negeri Australia yang terbagi menjadi tiga indikator yaitu technical assistance, project aid, dan program aid sesuai dengan kerangka bantuan luar negeri oleh Australia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah **“Bagaimana implementasi bantuan luar negeri Australia kepada Indonesia dalam sektor perubahan iklim tahun 2022-2024?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Penelitian ini dilakukan demi memenuhi mata kuliah skripsi yang menjadi ketentuan dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi bantuan luar negeri Australia kepada Indonesia di sektor perubahan iklim tahun 2022-2024 dengan pendekatan Foreign Aid.

1.4 Kerangka Teori/Konsep

1.4.1 Foreign Aid

Foreign Aid yang dikembangkan oleh John Degenbol-Martinussen & Poul Engberg-Pedersen pada bukunya yang berjudul “*Aid: Understanding International Development Cooperation*” memiliki pandangan sebagai instrument utama kerja sama pembangunan internasional yang melibatkan transfer sumber daya dari negara donor ke negara penerima dengan tujuan untuk proses pembangunan ekonomi, sosial, dan institusional. Argumen utama mereka menegaskan bahwa pembiayaan publik masih merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kesetaraan antara negara maju dan berkembang (Martinussen & Pedersen, 2003), sehingga perlu dilanjutkan dengan perbaikan efektivitasnya. John Degenbol-Martinussen & Poul Engberg-

Pedersen mengidentifikasi berbagai bentuk bantuan seperti *technical assistance*, *project aid*, dan *program aid* serta menyoroti kebutuhan untuk menyesuaikan modalitas tersebut dengan kapasitas dan konteks negara penerima. Ketiga bentuk bantuan tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan sebagai pendekatan yang saling melengkapi dalam praktik bantuan luar negeri. Masing-masing memiliki keunggulan dan keterbatasan yang berbeda, sehingga penggunaannya sering kali disesuaikan dengan tujuan pembangunan, konteks negara penerima, serta kepentingan dari pihak donor. Secara teori, mereka berasumsi bahwa kombinasi intervensi mikro (proyek terfokus) dan makro (dukungan program atau sektor) diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam kebijakan, mereka menekankan perlunya sinergi antara alokasi bantuan dengan kebijakan pembangunan domestik lain (misalnya infrastruktur dan agenda makro) serta peningkatan tata kelola aliran bantuan agar dana yang mengalir ke negara penerima benar-benar digunakan sesuai tujuan pembangunan (Martinussen & Pedersen, 2003).

Bentuk implementasi pertama dalam sebuah inisiasi foreign aid menurut John Degenbol-Martinussen & Poul Engberg-Pedersen adalah *Technical Assistance*. *Technical assistance* merupakan bentuk bantuan yang berfokus pada transfer pengetahuan, keterampilan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi di negara penerima. Bantuan ini tidak selalu berupa dana langsung, melainkan dapat berupa pelatihan, pengiriman tenaga ahli, konsultasi teknis, maupun pengembangan sistem kelembagaan. Menurut John Degenbol-Martinussen dan Poul Engberg-Pedersen, *technical assistance* memainkan peran penting dalam

mendukung pembangunan jangka panjang, terutama melalui peningkatan kapasitas dan penguatan institusi. Dengan adanya transfer pengetahuan dan keahlian, negara penerima diharapkan dapat mengelola proses pembangunan secara lebih mandiri dan berkelanjutan (Martinussen & Pedersen, 2003).

Yang kedua adalah *Project aid* yang merupakan bentuk bantuan yang paling konvensional dan historis dalam praktik pembangunan internasional. Bantuan ini diberikan untuk mendukung pelaksanaan proyek tertentu yang memiliki tujuan spesifik, lokasi yang jelas, serta jangka waktu yang telah ditentukan. *Project aid* sendiri meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, maupun program sektoral seperti pendidikan dan pertanian. Dalam implementasinya, *project aid* umumnya mengikuti siklus proyek yang meliputi tahap identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Proses ini sering kali didominasi oleh pihak donor, baik dalam hal desain proyek, pengelolaan anggaran, maupun pengawasan pelaksanaan. Hal ini menjadikan *project aid* sebagai bentuk bantuan yang relatif mudah dikontrol dan dievaluasi, karena memiliki indikator *output* yang jelas dan terukur. Namun menurut John Degenbol-Martinussen & Poul Engberg-Pedersen bahwa *project aid* sering kali bersifat kurang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional negara penerima. Selain itu dominasi donor dalam perencanaan dan implementasi proyek dapat mungurangi rasa kepemilikan dari pihak penerima, sehingga berpotensi melemahkan keberlanjutan pembangunan. *Project aid* juga dipahami sebagai bantuan yang bersifat mikro,

terfokus pada *output*, dan berbasis intervensi langsung (Martinussen & Pedersen, 2003).

Program Aid berbeda dengan *project aid* yang berorientasi pada proyek spesifik, *program aid* merupakan bentuk bantuan yang diberikan dalam skala yang lebih luas untuk mendukung kebijakan, strategi pembangunan, atau reformasi ekonomi suatu negara. Bantuan ini tidak diarahkan kepada satu proyek tertentu, melainkan pada keseluruhan program atau sektor, seperti sektor pendidikan, kesehatan, atau kebijakan fiskal. Bentuk konkret dari *program aid* adalah dukungan anggaran dan pendekatan sektoral, di mana donor memberikan bantuan langsung kepada pemerintah penerima donor untuk mendukung implementasi kebijakan yang telah dirancang. Menurut John Degenbol-Martinussen & Poul Engberg-Pedersen, *program aid* memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas bantuan karena mendorong harmonisasi antara donor serta memperkuat kepemilikan negara penerima terhadap proses pembangunan. Namun bentuk ini juga memiliki tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan akuntabilitas, transparansi, dan risiko penyalahgunaan dana. Selain itu dampak dari program aid sering kali sulit diukur secara langsung karena bersifat jangka panjang dan sistematis. *Program aid* juga diposisikan sebagai bantuan yang bersifat makro, strategis, dan berorientasi pada kebijakan serta reformasi struktural (Martinussen & Pedersen, 2003).

Tabel 1. 1 Justifikasi tahun pelaksanaan program

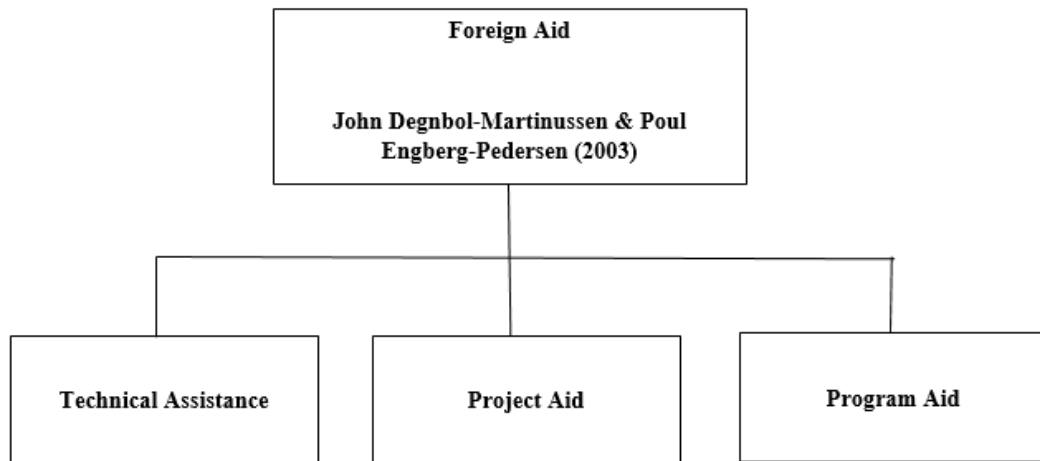
Sumber: Martinussen & Pedersen, 2003

(diolah oleh penulis)

Nama Program	Indikator	Waktu Pelaksanaan
PAIR (Partnership for Australia-Indonesia Research)	<i>Technical Assistance</i>	2022-2024
KONEKSI (Knowledge Partnership Platform)	<i>Technical Assistance dan Project Aid</i>	2023–2024
CIP (Australia-Indonesia Climate & Infrastructure Partnership)	<i>Program Aid</i>	2022–2024 (Komitmen 10 Tahun)
KINETIK (Partnership for Climate, Renewable Energy & Infrastructure)	<i>Program Aid</i>	2022–2024

Dalam penelitian ini difokuskan pada analisis pelaksanaan CIP tahun 2022-2024.

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 1 Bagan Pemikiran

Sumber: Martinussen & Pedersen, 2003

Catatan: Bagan pemikiran diolah dan dibuat oleh penulis

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa *Foreign Aid* dipahami sebagai bentuk kerja sama pembangunan yang diberikan oleh negara donor kepada negara penerima untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Dalam implementasinya, bantuan luar negeri umumnya diwujudkan dalam tiga indikator utama, yaitu *technical assistance*, *project aid*, dan *program aid*. *Technical assistance* berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi melalui pelatihan, transfer teknologi, maupun pengiriman tenaga ahli. *Project aid* diberikan untuk mendukung pelaksanaan proyek pembangunan tertentu yang memiliki tujuan dan jangka waktu yang jelas, seperti pembangunan infrastruktur atau program sektor tertentu. Sementara itu, *program aid* merupakan bantuan yang ditujukan untuk mendukung program

pembangunan dalam skala yang lebih luas, misalnya melalui dukungan anggaran atau bantuan pada sektor pembangunan tertentu. Ketiga bentuk bantuan tersebut menunjukkan bagaimana konsep *foreign aid* diimplementasikan dalam praktik kerja sama pembangunan internasional (Martinussen & Pedersen, 2003).

1.6 Argumen Utama

Implementasi bantuan luar negeri Australia kepada Indonesia di sektor perubahan iklim diimplementasikan dengan bentuk *foreign aid* yang tidak sekedar dipahami semata-mata sebagai transfer dana finansial, melainkan mencakup ketiga indikator konsep *foreign aid* dari John Degenbol-Martinussen & Poul Engberg-Pedersen (2003) yaitu *technical assistance*, *project aid*, dan *program aid*. Pertama, sebagai *technical assistance*, Australia menyediakan platform kolaborasi pengetahuan antara akademisi, lembaga riset, dan pembuat kebijakan di Indonesia dan Australia melalui program Koneksi. Program ini tidak menghasilkan output fisik secara langsung, melainkan berfokus pada produksi pengetahuan, riset berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta penguatan kapasitas aktor-aktor domestik dalam merespons isu perubahan iklim. Kemudian Australia juga menitikberatkan kolaborasi riset terapan di berbagai sektor pembangunan, termasuk perubahan iklim.

Yang kedua dalam pendekatan Project Aid, Australia memberikan bantuan dalam bentuk fisik berupa pembangunan panel surya yang dilaksanakan melalui program KINETIK. Selain secara fisik Program ini juga memberikan bantuan

dalam bentuk advisory, penyusunan kebijakan, studi kelayakan, serta peningkatan kapasitas pemerintah dalam merancang strategi energi rendah karbon.

Yang ketiga melalui pendekatan Program Aid melalui Climate and Infrastructure Partnership yang menunjukkan karakter yang lebih kompleks karena menggabungkan unsur *technical assistance* dengan *program aid*. CIP tidak hanya menyediakan dukungan teknis, tetapi juga berperan dalam mendorong reformasi kebijakan dan pembiayaan infrastruktur berkelanjutan dalam skala yang lebih luas.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau kondisi secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan keadaan di lapangan, tanpa melakukan manipulasi atau mencari hubungan sebab akibat. Penelitian ini lebih berfokus untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana gambaran suatu situasi, dengan mengumpulkan data, yang kemudian diinterpretasikan dalam bentuk deskripsi mendalam. Dilakukan dalam setting yang alami dan terstruktur, penelitian deskriptif memiliki tujuan utama untuk memotret situasi, mengevaluasi program, atau mengeksplorasi fenomena yang belum banyak diketahui, sehingga sering menjadi fondasi bagi pengambilan keputusan. Metode yang umum digunakan dalam pendekatan ini antara lain survei untuk menggambarkan karakteristik

populasi, studi kasus untuk eksplorasi mendalam, serta analisis dokumen atau konten untuk mendeskripsikan isi suatu media atau teks.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini mencakup analisis implementasi bantuan luar negeri Australia-Indonesia pada sektor perubahan iklim. Jangkauan penelitian ini dibatasi pada periode 2022 hingga 2024 dengan pertimbangan bahwa tahun 2022 sebagai titik awal didasarkan pada mulai menguatnya arah kebijakan kerja sama Australia Indonesia yang lebih terstruktur di bidang iklim dan energi, ditandai dengan munculnya kerangka baru seperti Climate and Infrastructure Partnership yang kemudian diikuti oleh program turunannya. Sementara itu, tahun 2024 dipilih sebagai batas akhir karena merepresentasikan periode terkini implementasi program yang sudah berjalan dan memiliki capaian yang dapat dianalisis secara lebih utuh. Secara geografis, penelitian ini mencakup wilayah Indonesia sebagai negara penerima bantuan, dengan perhatian khusus pada lokasi-lokasi pelaksanaan program bantuan Australia. Penelitian ini hanya berfokus pada sektor perubahan iklim, khususnya bentuk dan pola bantuan yang diberikan Australia, tanpa membahas sektor bantuan lain. Objek penelitian difokuskan pada beberapa program utama, yaitu CIP, KINETIK, KONEKSI, dan PAIR, karena program-program ini mencerminkan variasi bentuk bantuan yang relevan dengan kerangka teori. Adapun program sebelumnya seperti Indonesia AFCP hanya digunakan sebagai latar belakang untuk melihat perkembangan pola bantuan. Adapun aspek yang diteliti meliputi desain program, mekanisme pelaksanaan, aktor-aktor yang terlibat,

bentuk-bentuk dukungan yang diberikan, serta luaran yang dihasilkan dalam kerangka *foreign aid*. Pembatasan ini dilakukan agar penelitian tetap terarah dan mampu menjelaskan secara spesifik bagaimana perubahan pola bantuan Australia di sektor perubahan iklim berlangsung dalam periode tersebut.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berbasis studi pustaka (*library research*) dengan mengandalkan sumber-sumber data sekunder yang relevan dan kredibel. Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen resmi yang dipublikasikan oleh Pemerintah Australia melalui DFAT, termasuk laporan tahunan program, *policy briefs*, ringkasan eksekutif, dan publikasi resmi lainnya yang berkaitan dengan program-program yang berfokus kepada perubahan lingkungan. Di samping itu, penulis juga menelusuri dokumen dari pihak Indonesia seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (*Bappenas*), serta lembaga-lembaga mitra pelaksana seperti konsorsium universitas yang terlibat dalam program. Sumber data lainnya mencakup jurnal ilmiah terindeks, laporan penelitian dari lembaga think tank baik di Australia maupun Indonesia, artikel media massa yang melakukan peliputan terkait program, serta publikasi dari organisasi internasional yang membahas kerjasama energi terbarukan di kawasan. Penulis juga memanfaatkan basis data daring seperti situs resmi Kedutaan Besar Australia di Jakarta, laman program, serta repositori akademik untuk memperoleh akses terhadap publikasi hasil riset yang dihasilkan dari kolaborasi program. Seluruh dokumen yang terkumpul kemudian

diseleksi berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas penerbit, serta kesesuaian periode waktu yang ditetapkan. Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan selama penyusunan penelitian untuk memastikan kelengkapan informasi yang dibutuhkan.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis dengan pendekatan kualitatif. Penulis memulai proses analisis dengan melakukan reduksi data, yaitu memilah dan memfokuskan informasi yang relevan dengan rumusan masalah dan kerangka teoritis yang digunakan. Data-data tersebut kemudian dikategorisasikan berdasarkan tiga *indikator foreign aid* dari Martinussen dan Pedersen, yakni *technical assistance*, *project aid*, dan *program aid*. Pada tahap berikutnya, penulis menyajikan data dalam bentuk deskripsi naratif yang sistematis untuk menggambarkan bagaimana Australia mengimplementasikan bantuan luar negeri kepada Indonesia di sektor perubahan iklim merefleksikan masing-masing indikator tersebut. Proses analisis dilanjutkan dengan interpretasi mendalam untuk melihat keterkaitan antar indikator serta bagaimana ketiganya bekerja secara simultan dalam praktik bantuan pembangunan Australia kepada Indonesia. Penulis juga melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data. Terakhir, penulis menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Artinya penulis

menganalisis antara data, teori, dan interpretasi untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai fenomena yang diteliti.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas empat bab dengan sistematika pembagiannya sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori/konsep, sintesa pemikiran, argumen utama, serta metode penelitian yang terdiri atas tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II pada bab ini menjelaskan analisis **Implementasi *Technical Assistance* dan *Project Aid* dalam Hubungan Bilateral Australia-Indonesia di Sektor Perubahan Iklim** menggunakan kerangka teori *Foreign Aid* menurut John Degenbol-Martinussen & Poul Engberg-Pedersen dengan indikator *technical assistance* dan *project aid*.

BAB III bab ini menjelaskan **Implementasi *Program Aid* dalam Hubungan Bilateral Australia-Indonesia Sektor Perubahan Iklim** menggunakan kerangka teori *Foreign Aid* menurut John Degenbol-Martinussen & Poul Engberg-Pedersen dengan indikator *Program Aid*.

BAB IV berisi kesimpulan hasil penelitian mengenai implementasi *Foreign Aid* pada pelaksanaan bantuan luar negeri Australia kepada Indonesia di sektor perubahan iklim tahun 2022-2024.